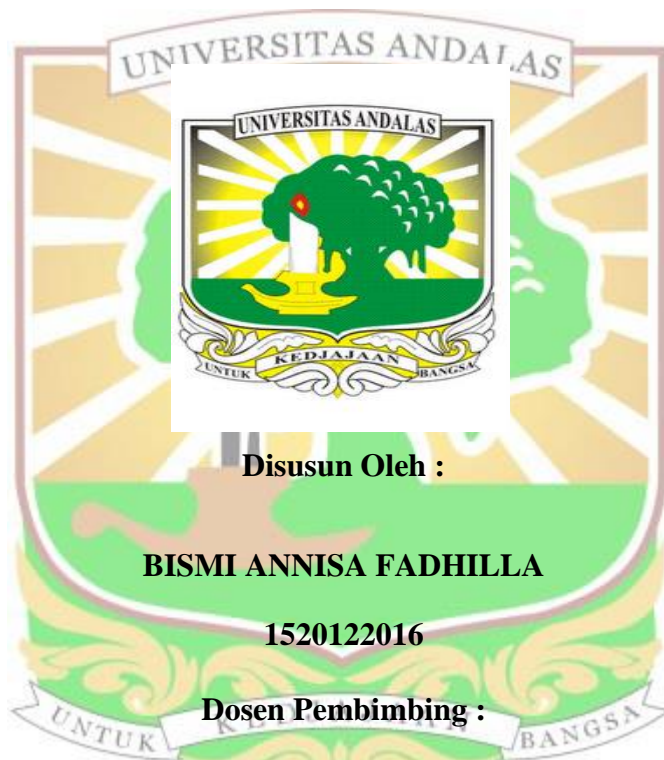


**TESIS**

**KONSEKUENSI YURIDIS PENETAPAN PENGAMPUAN DALAM  
PERKARA PERDATA NOMOR 122/Pdt.G/2015/PN.Pbr.**

*Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan*



**Disusun Oleh :**

**BISMI ANNISA FADHILLA**

**1520122016**

**Dosen Pembimbing :**

**Prof. Dr. H. YASWIRMAN, M.A.**

**H. SYAHRIAL RAZAK, S.H., M.H.**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2017**

## KONSEKUENSI YURIDIS PENETAPAN PENGAMPUAN DALAM PERKARA PERDATA NOMOR 122/Pdt.G/2015/PN.Pbr.

### ABSTRAK

(Bismi Annisa Fadhilla, 1520122016, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, 102 halaman, Padang, 2017)

Penetapan pengampuan Nomor 33/Pdt.P/2015/PN.Pbr. dijadikan sebagai salah satu alat bukti dalam perkara perdata Nomor 122/Pdt.G/2015/PN.Pbr., hal ini menyebabkan adanya konsekuensi yuridis penetapan pengampuan dalam perkara perdata tersebut. Tesis ini akan merumuskan permasalahan, *Pertama*, faktor diajukannya permohonan pengampuan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dan dasar pertimbangan hakim untuk menentukan seseorang berada dibawah pengampuan dalam Penetapan Pengampuan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 33/Pdt.P/2015/PN.Pbr., *Kedua*, akibat hukum dengan adanya Penetapan Pengampuan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 33/Pdt.P/2015/PN.Pbr. terhadap Perkara Perdata Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 122/Pdt.G/2015/PN.Pbr. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yang diawali dengan pengumpulan dan penyusunan data yang dilanjutkan dengan pengkajian data untuk memperoleh gambaran mengenai penetapan pengampuan, selanjutnya penulis melakukan pendekatan secara yuridis normatif dengan meneliti maupun mengkaji data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan tata urutan perundang-undangan agar tidak bertentangan dan dianalisis tanpa menggunakan rumus dan angka. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa *Pertama*, faktor diajukannya Permohonan Pengampuan Nomor 33/Pdt.P/2015/PN.Pbr. ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, adalah karena kondisi Prof. dr. Tabrani Rabb tidak cakap lagi dalam melakukan perbuatan hukum serta untuk melindungi kepentingan Prof. dr. Tabrani Rabb, dan dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pengampuan Nomor 33/Pdt.P/2015/PN.Pbr. adalah Prof. dr. Tabrani Rabb dapat dibuktikan tidak cakap lagi untuk mengurus diri sendiri maupun untuk bertindak dalam hukum dan dr. Susiana Anggraini merupakan sosok yang cakap serta tanggung jawab sehingga diangkat sebagai wali pengampu atas Prof. dr. Tabrani Rabb. *Kedua*, akibat hukum penetapan pengampuan Nomor 33/Pdt.P/2015/PN.Pbr. dalam perkara perdata Nomor 122/Pdt.G/2015/PN.Pbr. adalah pengampuan hanya berlaku semenjak tanggal dikeluarkannya penetapan pengampuan dan tidak dapat berlaku surut karena dapat mencederai kepastian hukum dan dapat merugikan pihak ketiga yang beriktikad baik sehingga perbuatan Tergugat II yang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Akta Kuasa Notaris Nomor 7 tanggal 20 Agustus 2014 tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada pihak Tergugat I dan Tergugat III.

***Kata Kunci: Pengampuan, Perbuatan Melawan Hukum, Akta Kuasa Notaris***

**THE JURIDICAL CONSEQUENCES OF THE ESTABLISHMENT OF  
CURATELE IN CIVIL CASE NUMBER 122/Pdt.G/2015/PN.Pbr.**

**ABSTRACT**

**(Bismi Annisa Fadhilla, 1520122016, Master of Notary, Law Faculty Andalas  
University, 102 pages, Padang, 2017)**

The Establishment of curatele No. 33/Pdt.P/2015/PN.Pbr. used as an evidence in civil case No. 122/Pdt.G/2015/PN.Pbr. led to the establishment of the juridical consequences of curatele in the civil case. This thesis will define the following issues. *First*, the fact that a petition of curatele had been submitted to Pekanbaru District Court and the judges' basic of consideration to determine a person is under an curatele in The Establishment of Curatele from Pekanbaru District Court No. 33/Pdt.P/2015/PN.Pbr., *Second*, the legal consequences from the existence of The Establishment of curatele of Pekanbaru District Court No. 33/Pdt.P/2015/PN.Pbr. towards Civil Case of Pekanbaru District Court No. 122/Pdt.G/2015/PN.Pbr. The method of analysis used in this study is analytical descriptive method which started by data collecting and preparation then followed by data analysis to receive an overview of the establishment of curatele, thus the writer conduct a normative juridical approach by analyzing the secondary data which consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The method used for data analysis is qualitative juridical, a method by observing the order of legislation to avoid conflicts and analyzed without using formulas and numbers. Based on the result of this study, it will be seen that, *First*, the factor of the submission of The Petition of curatele No. 33/Pdt.P/2015/PN.Pbr. to Pekanbaru District Court because the condition of Prof. dr. Tabrani Rabb is no longer able to conduct any law action and also to protect Prof. dr. Tabrani Rabb interests and also the judges' basic of consideration to listen the petition of curatele No. 33/Pdt.P/2015/PN.Pbr. is because Prof. dr. Tabrani Rabb can be proved is no longer able to take care of himself nor acts in law course and dr. Susiana Anggraini a capable figure who's also responsible so that she has been appointed as the guardian of Prof. dr. Tabrani Rabb. *Second*, the law consequences from The Establishment of curatele No. 33/Pdt.P/2015/PN.Pbr. towards civil case No. 122/Pdt.G/2015/PN.Pbr. is the curatele Establishment starts to apply from the date that it has been established and is not retroactive, since it can affects law assurance and could harm the third party so that the Defendant II deeds who commits an unlawful act according to Deed Power of Notary No. 7 dated August 20, 2014 cannot be held responsible to the Defendant I and Defendant III.

***Keywords: Curatele, Tort, Deed Power of Notary***